

## Implications of the PNG-US Defense Pact for Indonesia's Sovereignty and National Interests

Wujud Wiyono<sup>1\*</sup>, Taufiq Supriyanto<sup>2</sup>

Universitas Pertahanan

**Corresponding Author:** Wujud Wiyono [wewekambani971@gmail.com](mailto:wewekambani971@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Defense Pact, Regional stability, Regional sovereignty, Defense Cooperation, Bilateral relations

*Received* : 01 April

*Revised* : 20 April

*Accepted*: 24 May

©2024 Wiyono, Supriyanto

:This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

On May 22, 2023, Papua New Guinea signed a defense pact with the United States. This pact gives US troops access to airfields and ports in Papua New Guinea, which is part of US efforts to reduce China's influence in the Pacific region. The presence of US troops in Papua New Guinea could affect the stability of the surrounding region. Indonesia must ensure that its territory remains safe and is not threatened by foreign military presence in neighboring countries. Good communication is needed between Indonesia, Papua New Guinea and the US to ensure that military actions do not violate Indonesia's territorial sovereignty. The implications for Indonesia's national security must be considered. The presence of US troops near the Indonesian border could affect security dynamics in the region. Indonesia must ensure that foreign military presence does not threaten its national stability and security. Papua New Guinea and Indonesia have important regional ties. Cooperation in the defense sector must strengthen stability and security in the Pacific region. Indonesia needs to ensure that cooperation with Papua New Guinea and the US does not damage bilateral relations with neighboring countries. This research aims to understand how defense cooperation between Papua New Guinea and the United States can influence Indonesia's national interests, as well as to provide policy recommendations related to maintaining Indonesia's sovereignty and national interests in the context of the agreement. The research method used in this research is a qualitative research approach with a case study method.

## Implikasi Fakta Pertahanan PNG-AS terhadap Kedaulatan dan Kepentingan Nasional Indonesia

Wujud Wiyono<sup>1\*</sup>, Taufiq Supriyanto<sup>2</sup>

Universitas Pertahanan

**Corresponding Author:** Wujud Wiyono [wewekambani971@gmail.com](mailto:wewekambani971@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Fakta Pertahanan, Stabilitas wilayah, Kedaulatan wilayah, Kerjasama Pertahanan, Hubungan bilateral

*Received :* 01 April

*Revised :* 20 April

*Accepted:* 24 Mei

©2024 Wiyono, Supriyanto

:This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pada tanggal 22 Mei 2023, Papua Nugini menandatangani pakta pertahanan dengan Amerika Serikat. Pakta ini memberikan pasukan AS akses ke lapangan terbang dan pelabuhan di Papua Nugini, yang merupakan bagian dari upaya AS untuk meredam pengaruh China di kawasan Pasifik. Kehadiran pasukan AS di Papua Nugini dapat memengaruhi stabilitas wilayah di sekitarnya. Indonesia harus memastikan bahwa wilayahnya tetap aman dan tidak terancam oleh kehadiran militer asing di negara tetangga. Perlu komunikasi yang baik antara Indonesia, Papua Nugini, dan AS untuk memastikan bahwa tindakan militer tidak melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Implikasi keamanan nasional Indonesia harus diperhatikan. Kehadiran pasukan AS di dekat perbatasan Indonesia dapat mempengaruhi dinamika keamanan di kawasan. Indonesia harus memastikan bahwa kehadiran militer asing tidak mengancam kestabilan dan keamanan nasionalnya. Papua Nugini dan Indonesia memiliki hubungan regional yang penting. Kerjasama dalam bidang pertahanan harus memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan Pasifik. Indonesia perlu memastikan bahwa kerjasama dengan Papua Nugini dan AS tidak merusak hubungan bilateral dengan negara tetangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kerjasama pertahanan antara Papua Nugini dan Amerika Serikat dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia dalam konteks perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.

---

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 22 Mei 2023, Papua Nugini (PNG) dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani sebuah pakta pertahanan baru yang memungkinkan AS untuk meningkatkan kerjasama militer dan membangun pangkalan militer di wilayah PNG (BBC News, 2023). Perjanjian ini semakin memperkuat aliansi militer antara kedua negara dalam menghadapi pengaruh dan ekspansi militer yang semakin besar dari Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik (Lowy Institute, 2023). Bagi Indonesia, pakta pertahanan ini memunculkan kekhawatiran serius terkait ancaman terhadap kedaulatan teritorial dan kepentingan nasional, mengingat PNG berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di Pulau Papua.

Secara historis, PNG memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia, baik dalam konteks budaya, sosial, maupun politik (Kusuma & Sato, 2019). Namun, kehadiran militer AS di wilayah PNG berpotensi mengganggu stabilitas keamanan regional dan mengancam kedaulatan teritorial Indonesia di wilayah perbatasan (Lowy Institute, 2021). Selain itu, pakta ini juga dapat memengaruhi proyeksi kekuatan militer Indonesia di kawasan serta mengurangi pengaruh geopolitik Indonesia di Pasifik (Weatherbee, 2019).

Dalam konteks kepentingan nasional, kehadiran militer AS di PNG dapat mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia (Kusuma & Sato, 2019). Hal ini juga dapat memperlemah posisi tawar Indonesia dalam diplomasi internasional, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Indo-Pasifik (Weatherbee, 2019).

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengkaji secara mendalam implikasi pakta pertahanan PNG-AS terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Analisis ini akan mencakup perspektif sejarah, politik, keamanan, ekonomi, dan diplomasi, serta merekomendasikan langkah-langkah strategis yang dapat diambil Indonesia untuk menghadapi tantangan ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pada bulan Mei 2023, Papua Nugini (PNG) dan Amerika Serikat (AS) menandatangani sebuah perjanjian kerjasama pertahanan yang disebut sebagai Pakta Pertahanan PNG-AS. Perjanjian ini memungkinkan AS untuk meningkatkan kehadirannya di wilayah Pasifik, termasuk pembangunan pangkalan militer di PNG. Pakta ini memiliki implikasi signifikan terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam konteks keamanan dan geopolitik di kawasan.

### 1. Kedaulatan Wilayah

Menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, setiap negara memiliki hak kedaulatan penuh atas wilayah daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis pantai (Beckman & Davenport, 2012). Kehadiran pangkalan militer asing di negara tetangga dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di wilayah perbatasan (Gindarsah, 2015).

### 2. Kepentingan Nasional Indonesia

Kepentingan nasional Indonesia meliputi aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, dan politik (Darmosumarto, 2017).

Kehadiran kekuatan militer asing yang besar di kawasan dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan regional dan mengancam stabilitas kawasan (Anwar, 2019).

Peningkatan aktivitas militer asing di kawasan dapat memicu persaingan senjata dan meningkatkan ketegangan geopolitik (Sukma, 2012).

### **3. Keamanan Maritim**

Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan maritim di wilayah perairan sekitarnya, termasuk Laut Pasifik (Djalal, 2008).

Kehadiran pangkalan militer asing dapat membawa implikasi terhadap jalur pelayaran dan perdagangan maritim Indonesia (Bakorkamla, 2018).

### **4. Hubungan Bilateral Indonesia-PNG dan Indonesia-AS**

Indonesia memiliki hubungan baik dengan PNG, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan (Patunru & Zain, 2019). Hubungan Indonesia-AS juga penting bagi kedua negara dalam berbagai aspek, termasuk pertahanan dan keamanan (Sukma & Prasetyono, 2003).

## **METODOLOGI**

Untuk meneliti implikasi Pakta Pertahanan PNG-AS terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus akan sangat relevan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018). Berikut adalah metodologi yang dapat digunakan:

#### **1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif**

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat eksplorasi dan menghasilkan data deskriptif tentang implikasi Pakta Pertahanan PNG-AS.

#### **2. Metode Penelitian: Studi Kasus**

Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor yang terlibat.

#### **3. Pengumpulan Data:**

##### **a. Studi Literatur**

Mengkaji literatur terkait, seperti buku, jurnal, laporan resmi, dan dokumen pemerintah untuk memahami konteks Pakta Pertahanan PNG-AS, kedaulatan wilayah, kepentingan nasional Indonesia, dan implikasi geopolitik.

##### **b. Wawancara Mendalam**

Melakukan wawancara dengan para ahli, pejabat pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki pengetahuan dan perspektif terkait topik penelitian.

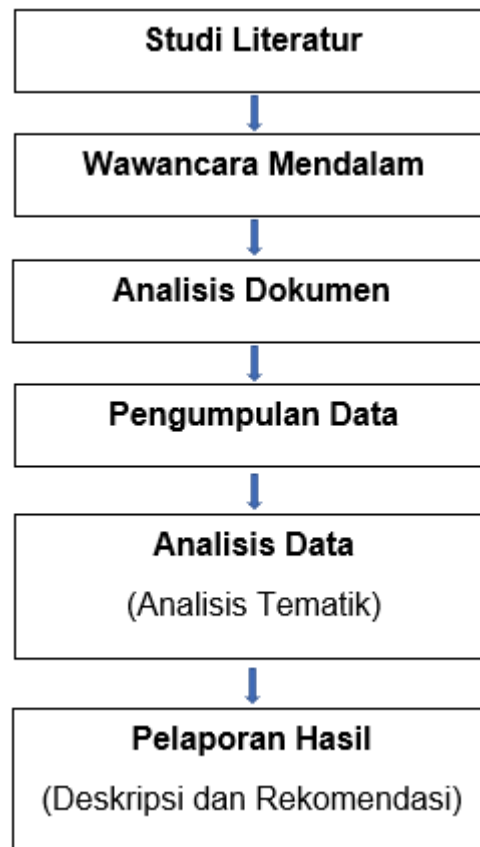
##### **c. Analisis Dokumen**

Menganalisis dokumen resmi, seperti perjanjian, kebijakan, pernyataan resmi, dan laporan terkait Pakta Pertahanan PNG-AS dan implikasinya.

#### **4. Analisis Data:**

- Menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data yang dikumpulkan (Braun & Clarke, 2006).

- Melakukan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.
5. Pelaporan Hasil:
- Menyajikan temuan penelitian secara deskriptif dan mendalam, dengan mengaitkan temuan tersebut dengan teori dan literatur yang relevan.
  - Memberikan rekomendasi dan implikasi kebijakan terkait dengan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia dalam konteks Pakta Pertahanan PNG-AS.



Gambar 1. Diagram Alir

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Potensi Peningkatan Ketegangan Regional dan Persaingan Kekuatan Besar di Kawasan

Potensi peningkatan ketegangan regional dan persaingan kekuatan besar di kawasan merupakan salah satu implikasi signifikan dari Pakta Pertahanan PNG-AS terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Kehadiran pangkalan militer AS di Papua Nugini (PNG) dapat memicu gesekan geopolitik dan meningkatkan persaingan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan regional.

#### 1. Peningkatan Ketegangan Regional

- Kehadiran militer AS yang lebih kuat di kawasan dapat dipandang sebagai upaya untuk mengontrol dan memproyeksikan kekuatan di wilayah tersebut (Kaplan, 2014).

- Negara-negara lain, seperti Cina, dapat melihat ini sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka dan membalas dengan meningkatkan kehadiran militer mereka sendiri (Dobell, 2019).
  - Situasi ini dapat memicu siklus peningkatan ketegangan dan persaingan militer di kawasan, yang dapat meningkatkan risiko konflik terbuka (Gindarsah, 2015).
2. Persaingan Kekuatan Besar
    - Pakta Pertahanan PNG-AS dapat dipandang sebagai bagian dari upaya AS untuk memperlambat pengaruh Cina yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik (Herlijanto, 2021).
    - Cina kemungkinan akan merespons dengan meningkatkan hubungan ekonomi dan militer dengan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk mengimbangi pengaruh AS (Parameswaran, 2018).
    - Persaingan kekuatan besar antara AS dan Cina dapat membagi negara-negara di kawasan ke dalam blok-blok yang berbeda, menciptakan ketegangan dan memicu konflik kepentingan (Sukma, 2012).
  3. Dampak pada Kedaulatan dan Kepentingan Nasional Indonesia
    - Peningkatan ketegangan regional dan persaingan kekuatan besar dapat membatasi ruang gerak Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif (Anwar, 2019).
    - Indonesia mungkin harus lebih berhati-hati dalam mengambil posisi yang seimbang untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak dan menghindari terlibat dalam konflik kekuatan besar (Gindarsah, 2018).
    - Situasi ini juga dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia, terutama di wilayah perbatasan dan perairan yang strategis, serta mengganggu jalur perdagangan dan investasi (Bakorkamla, 2018).

### **Pengaruh terhadap Poros Maritim dan Jalur Pelayaran Strategis Indonesia**

Menurut Wardoyo, S. (2022), Pengaruh terhadap poros maritim dan jalur pelayaran strategis Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam penelitian mengenai implikasi Pakta Pertahanan PNG-AS terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki sejumlah selat yang merupakan jalur pelayaran internasional, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Jalur-jalur ini memegang peranan vital dalam perdagangan dan transportasi maritim global, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Dengan adanya Pakta Pertahanan PNG-AS, terdapat potensi peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah Samudera Pasifik, termasuk di sekitar perairan Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi jalur pelayaran strategis Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Laksmana, E. A. (2021) berpendapat, secara langsung, peningkatan aktivitas militer AS di wilayah tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan keselamatan pelayaran di jalur-jalur strategis Indonesia. Adanya latihan militer, pengawalan kapal perang, atau bahkan potensi konflik

bersenjata dapat mengganggu kelancaran lalu lintas maritim dan membahayakan keselamatan pelayaran.

Pendapat Muhibat, S. (2020), secara tidak langsung, Pakta Pertahanan PNG-AS dapat memicu reaksi dari negara-negara lain, terutama Cina, yang juga memiliki kepentingan di wilayah Pasifik. Hal ini dapat memicu persaingan kekuatan militer di kawasan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas keamanan maritim dan mengganggu jalur pelayaran strategis Indonesia.

Selain itu, adanya pergeseran kekuatan militer di kawasan Pasifik dapat mempengaruhi poros maritim Indonesia, yang merupakan konsep pengembangan wilayah maritim Indonesia sebagai pusat perdagangan dan konektivitas maritim global. Konsep ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor maritim.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2019), untuk meminimalisir dampak negatif dari Pakta Pertahanan PNG-AS terhadap poros maritim dan jalur pelayaran strategis Indonesia, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan diplomasi maritim, memperkuat kerjasama regional, dan meningkatkan kemampuan pertahanan maritim.

### **Respons dan Kebijakan Luar Negeri yang dapat Diambil Indonesia Menghadapi Situasi Ini**

Dalam menghadapi situasi yang ditimbulkan oleh Pakta Pertahanan PNG-AS, Indonesia perlu merespons dengan bijak dan mengambil kebijakan luar negeri yang tepat. Berikut ini merupakan respons dan kebijakan luar negeri yang dapat diambil Indonesia:

#### **1. Diplomasi Proaktif**

Indonesia perlu menempuh diplomasi yang proaktif, baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral, Indonesia dapat melakukan pendekatan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat dalam pakta tersebut, seperti Amerika Serikat dan Papua Nugini, untuk menyampaikan keprihatinan dan mencari solusi yang dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia.

Secara multilateral, Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum regional seperti ASEAN, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan East Asia Summit (EAS) untuk membangun kesepakatan dan mempromosikan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik (Syahrin M. A, .2018).

#### **2. Memperkuat Kerjasama Keamanan Regional**

Indonesia dapat mengintensifkan kerjasama keamanan regional dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran intelijen, latihan bersama, patroli maritim terpadu, dan penanganan ancaman keamanan maritim secara kolektif.

Kerjasama keamanan regional yang kuat akan membantu memelihara stabilitas di kawasan dan mengurangi risiko konflik atau persaingan kekuatan militer yang dapat mengancam kepentingan maritim Indonesia (Sukma R, 2021).

#### **3. Penguatan Pertahanan Maritim**

Pada Buku Putih Diplomasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020), menerangkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kapabilitas pertahanan maritimnya, baik dari segi sumber daya manusia, alutsista, maupun infrastruktur. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, serta melindungi jalur pelayaran strategis. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain modernisasi angkatan laut, peningkatan patroli maritim, dan pengembangan sistem pengawasan maritim yang terintegrasi.

4. Diversifikasi Jalur Pelayaran

Untuk mengurangi ketergantungan pada jalur pelayaran strategis tertentu, Indonesia dapat mendorong diversifikasi jalur pelayaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan rute pelayaran alternatif, serta meningkatkan konektivitas maritim dengan negara-negara tetangga (Bateman S. & Bergin A, 2019).

5. Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Maritim

Pada Buku Putih Pertahanan Indonesi, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022) menjelaskan bahwa Indonesia dapat mempromosikan kerja sama ekonomi maritim dengan negara-negara lain, seperti pengembangan kawasan industri maritim, perdagangan maritim, pariwisata bahari, dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim global.

### **Pengaruh terhadap Stabilitas Kawasan dan Hubungan Bilateral Indonesia dengan PNG dan AS**

Pakta Pertahanan PNG-AS memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas kawasan dan hubungan bilateral Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) dan Amerika Serikat (AS). Berikut ini adalah pengaruh yang dapat terjadi antara lain:

1. Pengaruh terhadap Stabilitas Kawasan

Pakta Pertahanan PNG-AS dapat memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan, terutama Cina yang merupakan rival kekuatan utama AS di wilayah Pasifik. Hal ini dapat memicu persaingan kekuatan militer dan meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan (Supriyanto R A, 2021). Persaingan kekuatan militer yang meningkat berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan meningkatkan risiko konflik terbuka. Selain itu, peningkatan aktivitas militer AS di wilayah Pasifik juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mengontrol dan mendominasi jalur pelayaran strategis di kawasan tersebut (Wardoyo S, 2022). Situasi ini dapat memicu reaksi balasan dari negara-negara lain, yang pada gilirannya dapat memicu siklus eskalasi ketegangan dan persaingan kekuatan di kawasan.

2. Hubungan Bilateral dengan PNG

Pakta Pertahanan PNG-AS berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan PNG. Sebagai negara tetangga yang dekat secara geografis, Indonesia memiliki kepentingan strategis di PNG, termasuk dalam hal keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Adanya pakta pertahanan dengan AS dapat membuat PNG lebih condong ke arah kebijakan luar negeri yang pro-AS, yang berpotensi menjauhkan PNG dari Indonesia dan negara-

negara ASEAN lainnya. Hal ini dapat menghambat upaya kerjasama regional dan memperlemah posisi tawar Indonesia dalam menghadapi isu-isu kawasan (Weatherbee D, 2022)

### 3. Hubungan Bilateral dengan AS

Pakta Pertahanan PNG-AS juga dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan AS. Sebagai mitra strategis, Indonesia dan AS memiliki kerjasama yang luas di berbagai bidang, termasuk keamanan dan pertahanan (Laksmiana E A, 2021). Namun, kehadiran militer AS yang lebih besar di wilayah Pasifik dapat dipandang sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral dan menghambat kerjasama di bidang lain. Di sisi lain, Indonesia juga dapat memanfaatkan hubungan baik dengan AS untuk menyampaikan keprihatinan dan mencari solusi yang dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam konteks pakta pertahanan tersebut.

### **Analisis tentang Posisi Indonesia dalam Menjaga Netralitas dan Kemandirian Politik Luar Negeri**

Indonesia telah lama menjunjung prinsip netralitas dan kemandirian dalam politik luar negerinya, yang dikenal sebagai "bebas-aktif". Prinsip ini menekankan pada sikap tidak memihak dalam konflik atau persaingan kekuatan antara negara-negara besar, serta mengambil posisi yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi asing (Anwar D F, 2020).

Dalam kasus Pakta Pertahanan PNG-AS, Indonesia dihadapkan pada situasi yang menguji komitmennya terhadap prinsip netralitas dan kemandirian politik luar negeri. Di satu sisi, Indonesia memiliki hubungan baik dengan AS sebagai mitra strategis, tetapi di sisi lain, kehadiran militer AS yang lebih besar di wilayah Pasifik dapat dipandang sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia (Sukma R, 2021).

Untuk menjaga netralitas dan kemandirian politik luar negerinya, Indonesia perlu mengambil sikap yang tegas dan konsisten. Indonesia harus menegaskan bahwa keputusan untuk terlibat dalam pakta pertahanan atau kerjasama militer dengan negara lain merupakan hak setiap negara berdaulat, termasuk PNG. Namun, Indonesia juga harus menyampaikan keprihatinan dan memastikan bahwa pakta tersebut tidak mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia (Wardoyo S, 2022).

Berdasarkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020) bahwa Indonesia juga harus mengutamakan diplomasi multilateral dan kerjasama regional dalam menghadapi situasi ini. Dengan membangun solidaritas dan konsensus bersama negara-negara ASEAN dan mitra strategis lainnya, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya dan memastikan bahwa kepentingan nasionalnya terlindungi.

Di samping itu, Indonesia harus terus memperkuat kemampuan pertahanan dan keamanan nasionalnya, sehingga tidak bergantung secara berlebihan pada kekuatan asing. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan kemandirian politik luar negerinya dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan atau intervensi dari negara-negara besar.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

### **Kesimpulan:**

1. Kehadiran pasukan AS di Papua Nugini melalui Pakta Pertahanan PNG-AS dapat memengaruhi stabilitas wilayah di sekitarnya.
2. Indonesia perlu memastikan bahwa wilayahnya tetap aman dan tidak terancam oleh kehadiran militer asing di negara tetangga.
3. Implikasi keamanan nasional Indonesia harus diperhatikan, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional.

### **Rekomendasi:**

- a. Perlu adanya komunikasi yang baik antara Indonesia, Papua Nugini, dan AS untuk memastikan bahwa tindakan militer tidak melanggar kedaulatan wilayah Indonesia.
- b. Indonesia harus memastikan bahwa kehadiran militer asing di dekat perbatasannya tidak mengancam stabilitas dan keamanan nasional.
- c. Kerjasama dalam bidang pertahanan antara Indonesia, Papua Nugini, dan AS harus memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan Pasifik.
- d. Penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan negara tetangga dan mitra strategis lainnya dalam menghadapi dinamika keamanan regional.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayahnya, memperkuat posisi tawar dalam diplomasi regional, dan memastikan keamanan nasional terjaga di tengah ketegangan regional dan persaingan kekuatan besar.

## PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan yang relevan untuk "Implikasi Pakta Pertahanan PNG-AS terhadap Kedaulatan dan Kepentingan Nasional Indonesia" dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Analisis lebih lanjut pada implikasi pakta pertahanan: Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada analisis lebih lanjut tentang bagaimana pakta pertahanan PNG-AS mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia, serta bagaimana Indonesia dapat menjaga kepentingan nasionalnya dalam situasi ini.
2. Pengembangan kerjasama antar negara: Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengembangan kerjasama antar negara yang lebih intensif dan lebih luas, serta bagaimana kerjasama ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
3. Pengawasan perbatasan: Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada pengawasan perbatasan yang lebih efektif dan lebih efisien, serta bagaimana pengawasan ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
4. Pengembangan infrastruktur: Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengembangan infrastruktur yang lebih luas dan lebih intensif di wilayah perbatasan, serta bagaimana pengembangan ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

5. Analisis keamanan: Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada analisis keamanan yang lebih lanjut dan lebih rinci, serta bagaimana keamanan ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
6. Pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional: Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional yang lebih luas dan lebih intensif, serta bagaimana kerjasama ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
7. Pengembangan kerjasama dengan organisasi regional: Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengembangan kerjasama dengan organisasi regional yang lebih luas dan lebih intensif, serta bagaimana kerjasama ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
8. Pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional: Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional yang lebih luas dan lebih intensif, serta bagaimana kerjasama ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
9. Analisis implikasi ekonomi: Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada analisis implikasi ekonomi yang lebih lanjut dan lebih rinci, serta bagaimana implikasi ekonomi ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.
10. Pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional dalam bidang ekonomi: Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan pengembangan kerjasama dengan organisasi internasional dan regional dalam bidang ekonomi yang lebih luas dan lebih intensif, serta bagaimana kerjasama ini dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afp. (2023). Papua Nugini dan AS Tandatangani Pakta Keamanan. <https://www.voaindonesia.com/a/papua-nugini-dan-as-tandatangani-pakta-keamanan/7103590.html>
- Afp. (2024). Papua Nugini dan Indonesia Rampungkan Perjanjian Pertahanan. <https://www.voaindonesia.com/a/papua-nugini-dan-indonesia-rampungkan-perjanjian-pertahanan/7508032.html>
- Anwar, D. F. (2019). Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 25-40.
- Anwar, D. F. (2020). Prinsip Bebas-Aktif dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Antara Idealisme dan Realisme. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Bakorkamla. (2018). Strategi Keamanan Maritim Indonesia. Jakarta: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Bateman, S., & Bergin, A. (2019). Keamanan Maritim di Asia Tenggara: Tantangan dan Prospek. Singapura: ISEAS Publishing.
- BBC News. (2023, 22 Mei). US and Papua New Guinea sign defence pact to counter China's influence. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-65675627>
- Beckman, R., & Davenport, T. (2012). The EEZ Regime: Reflections after 30 Years. *Ocean Development & International Law*, 43(1), 1-20.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Darmosumarto, S. (2017). Konsep Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 1-12.
- Djalal, H. (2008). Kepentingan Maritim Indonesia di Laut Pasifik. *Jurnal Maritim*, 4(2), 1-15.
- Dobell, G. (2019). Australia's New Strategic Reality in the South Pacific. Lowy Institute Analysis.
- Gindarsah, I. (2015). Kedaulatan Wilayah dan Implikasinya terhadap Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan*, 5(1), 1-18.
- Gindarsah, I. (2018). Kepentingan Nasional Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 1-16.

- Herlijanto, J. (2021). Indonesia's Responses to the US-China Rivalry in the Indo-Pacific Region. *Asian Survey*, 61(2), 295-322.
- Ikatandinas. (2021). Pengaruh Pakta Warsawa Terhadap Indonesia: Sejarah, Dampak, dan Implikasinya. <https://www.noos.co.id/pengaruh-pakta-warsawa-terhadap-indonesia-46192.html>
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2019). *Rencana Induk Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Buku Putih Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kusuma, A., & Sato, Y. (2019). Connecting the Indonesian and Papuan Economies: Opportunities and Challenges. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 9(1), 1-21. <https://doi.org/10.14203/jissh.v9i1.128>
- Laksmiana, E. A. (2021). *Membangun Poros Maritim Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Lowy Institute. (2021). *Strengthening Indonesia's Defence Diplomacy to Secure National Interests*. Lowy Institute Policy Brief. <https://www.lowyinstitute.org/publications/strengthening-indonesia-s-defence-diplomacy-secure-national-interests>
- Lowy Institute. (2023, 23 Mei). *The US-PNG Defence Pact: Implications for Indonesia and the Region*. Lowy Institute Commentary. <https://www.lowyinstitute.org/publications/us-png-defence-pact-implications-indonesia-and-region>
- Muhibat, S. (2020). Keamanan Maritim Indonesia di Tengah Persaingan Kekuatan Besar. *Jurnal Keamanan Maritim*, 6(1), 19-36.
- Parameswaran, P. (2018). Seeking Security in the Indo-Pacific. *Asian Affairs*, 49(2), 298-316.
- Patunru, A., & Zain, N. (2019). Hubungan Ekonomi Indonesia-Papua Nugini: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(2), 1-15.

- Rismawati, Y. (2023). Rangkuman tentang Wawasan Nusantara dalam Konteks NKRI. <https://tirto.id/rangkuman-tentang-wawasan-nusantara-dalam-konteks-nkri-gTsq>
- Sukma, R. (2012). Keamanan Kawasan dan Kepentingan Nasional Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1-12.
- Sukma, R. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Tengah Persaingan Kekuatan Besar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 123-142.
- Sukma, R. (2021). Tantangan Keamanan Maritim Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(1), 1-16.
- Sukma, R., & Prasetyono, E. (2003). *Indonesia-US Relations: Advancing Renewed Partnership*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Supriyanto, R. A. (2021). Implikasi Pakta Pertahanan PNG-AS terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(2), 121-138.
- Syahrin, M. A. (2018). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2), 1-22.
- The Jakarta Post. (2023). Pakta pertahanan AS-PNG. <https://www.thejakartapost.com/id/opinion/2023/05/24/the-us-png-defense-pact.html>.
- Wardoyo, S. (2022). Implikasi Pakta Pertahanan PNG-AS terhadap Kedaulatan dan Kepentingan Nasional Indonesia. *Jurnal Pertahanan Negara*, 12(2), 35-54.
- Weatherbee, D. (2022). The US-PNG Defense Pact: Implications for Regional Security. *Asia-Pacific Review*, 29(1), 22-39.
- Weatherbee, D. E. (2019). Indonesia in ASEAN: A Contested Supremacy. *The Pacific Review*, 32(3), 415-442. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1471699>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.